

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Optimalisasi Potensi

a. Pengertian Optimalisasi Potensi

Optimalisasi adalah ukuran yang dari perspektif bisnis usaha untuk tercapainya tujuan. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan atau.¹ Optimalisasi merupakan proses mengoptimalkan sesuatu, dengan menjadikan sesuatu menjadi yang terbaik baik.²

Optimasi merupakan suatu proses optimasi untuk mencari solusi terbaik dari sejumlah alternatif solusi yang ada. Optimasi terjadi dengan memaksimalkan fungsi tujuan tanpa melanggar batasan apa pun. Melalui optimasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektivitasnya, yaitu meningkatkan

¹Praysi Nataly Rattu, Novie R Pioh, and Stefanus Sampe, 'Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)', *Jurnal Governance*, 2.1 (2022), pp. 1–9.

²Piki Darma Kristian Pardede, Desi Januari Tafonao, and Erwin Edielis Buulolo, 'Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Nias Selatan 2019/2020', *Jurnal Governance Opinion*, 6.2 (2021), pp. 78–89.

keuntungan, meminimalkan waktu pemrosesan, dan lain-lain.³

Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif, efisien, dan mengoptimalkan sesuatu agar menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan pengertian potensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dan mempunyai peluang untuk dikembangkan dan menjadi terkini.⁴ Potensi diri merupakan kemampuan mendasar dalam diri seseorang yang masih terpendam dan mempunyai peluang untuk dikembangkan apabila didukung dengan partisipasi lingkungan, pelatihan dan fasilitas yang memadai.

Potensi adalah kemampuan yang dapat dikembangkan seperti kekuatan, kesanggupan, dan gaya yang bisa dikembangkan untuk tumbuh lebih tinggi.⁵

³Asep Hidayat and M Irvanda, 'Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance', *Hospitality*, 11.1 (2022), pp. 281–90.

⁴Aam Amaliyah and Azwar Rahmat, 'Pengembangan Potensi Diri Peserta Didik Melalui Proses Pendidikan', *Attadib: Journal of Elementary Education*, 5.1 (2021), p. 28, doi:10.32507/attadib.v5i1.926.

⁵Kiki Endah, 'Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.1 (2020), pp. 135–43.

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa potensi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki agar dapat dikembangkan untuk dikemudian hari/masa yang akan datang.

b. Indikator Optimalisasi Potensi

Adapun beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi, yaitu sebagai berikut:⁶

1) Tujuan

Tujuannya dapat berupa maksimalisasi jika tujuan yang digunakan untuk optimalisasi berkaitan dengan keuntungan, pendapatan. Dalam bentuk minimal, ketika tujuan pengoptimalan terkait dengan biaya, waktu, jarak. Juga dalam penetapan tujuan, kita perlu memerhatikan apa yang meminimalkan dan memaksimalkan.

2) Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan didasarkan pada sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Alternatif keputusan yang tersedia adalah mereka yang menggunakan sumber daya terbatas yang tersedia bagi mereka. Oleh karena itu, alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

⁶Sri Astuti Wulandani, Tria Amallia, and Zafira Nur Yusra, 'Optimalisasi Target Dan Realisasi Pajak Pada E-Filling Di Kota Bandung', *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 1.1 (2022), pp. 22–30, doi:10.15575/jpkip.v1i1.20361.

3) Sumber Daya yang Dibatasi

Sumber daya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas, sehingga harus adanya keterlibatan dalam bergabung untuk memenuhi kebutuhan proses optimalisasi.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM adalah pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai usaha kecil, menggunakan teknologi tradisional dan dikelola secara sederhana. UMKM yaitu perseorangan atau usaha kecil dan memiliki batasan tertentu dalam hal jumlah tenaga kerjanya, jumlah penjualan, serta jumlah aset.⁷

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. UMKM dinilai penting karena mampu meningkatkan daya saing perekonomian, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat menjadi solusi kemiskinan terutama dengan berkontribusi terhadap PDB Indonesia. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menjadi garda terdepan dalam

⁷Nova Yanti mahela, 'Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Keuangan Mikro Syariah', *Economica Sharia*, 1 (2015), p. 59.

melindungi dan memajukan sektor UMKM agar dapat berkembang menjadi lebih baik.⁸

b. Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah

Salah satu upaya untuk memajukan UMKM adalah dengan memfasilitasi akses UMKM terhadap permodalan dan pembiayaan, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat produksi dan merangsang pertumbuhan lapangan kerja. Upaya peningkatan UMKM juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya melalui pengalokasian sumber daya pendapatan dan belanja negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada koperasi dan UMKM di daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan peningkatan koperasi bagi UMKM yang berbentuk tulang punggung perekonomian daerah. Menurut Junaidi, penyaluran dana APBN untuk pengembangan koperasi dan UMKM ditujukan untuk:⁹

- 1) Mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- 2) Akselerasi digitalisasi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

⁸Eya Zahrotul Fadlilah and Siti Aminah Anwar, 'Peningkatan Kinerja Umkm Di Kabupaten Pringsewu (Studi Kasus Pada BMT NU Pringsewu)', *El-Aswaq: Islamic Economic and Finance*, 3.2 (2022), 401–8.

⁹Junaidi, 'Penyaluran Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) Untuk Bantu UMKM', *Djbp*, 2023.

- 3) Meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil;
 - 4) Menumbuhkan wirausaha pemula.
- d. Indikator Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah

Keberhasilan bisnis dapat diukur dari berbagai aspek, termasuk keuntungan yang dicapai perusahaan. Kesuksesan usaha juga berkaitan dengan pengembangan yaitu penciptaan karyawan baru, peningkatan aset dan pendapatan.

Tiga variabel dalam pertumbuhan UMKM memiliki indikator yaitu:¹⁰

1) Peningkatan Produksi

Peningkatan produksi meliputi produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses dan kesalahan.

2) Peningkatan Penjualan

Meningkatkan penjualan meliputi peningkatan jumlah penjualan, menghasilkan keuntungan, dan menunjang pertumbuhan bisnis.

3) Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan juga mencakup pendapatan yang diterima.

¹⁰Andi Cahyono, Akbar Anugrah, Romi Adetio Setiawan, 'Tranformasi Program Bengkulu Makmur Terhadap Peningkatan Kondisi Usaha Mustahik : Analisis', *Islamic Banking and Finance*, 6.November (2023), 542–51.

Indikator untuk meningkatkan kinerja UMKM ada 14 yaitu: reputasi, produktivitas, kepuasan karyawan, keuntungan, hasil penjualan atau pendapatan, kesesuaian produk, modal yang cukup, efektivitas produksi, kualitas produk, pencapaian target, jumlah pelanggan, kemudahan pengawasan dan pengurangan biaya. biaya produksi.¹¹

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bentuk perbankan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BPRS memprioritaskan pemberian pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta BPRS yang beroperasi di daerah pedesaan atau kabupaten dimana masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan di daerah tersebut. Oleh karena itu, BPRS dapat dikatakan dapat memberikan layanan dengan jangkauan jumlah yang lebih luas kepada masyarakat.¹²

¹¹Pipie Puspitasari and others, 'Penyuluhan Peningkatan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19', *Journal Wahana Abdiman Sejahtera*, 3 (2022), pp. 209–17.

¹²Nurul Ichsan Hasan and R. Rizny Anindya Reswenty, 'Pengaruh FDR, NPF, CAR, Dan Bopo Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)', *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1.2 (2021), pp. 145–57, doi:10.53566/jer.v1i2.30.

BPRS merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa di bidang pengangkutan dan pembayaran sebagai bagian dari kegiatannya.¹³

b. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peran lembaga pembiayaan syariah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia tentu ada yang berhasil ataupun tidak. Berhasil atau tidaknya peran lembaga pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Dalam hal penyediaan pembiayaan, lembaga keuangan formal dinilai hanya sebatas UMKM. Oleh karena itu, UMKM semakin tertarik pada lembaga informal karena lebih fleksibel, misalnya. Persyaratan pinjaman dan jumlah pinjaman tidak terlalu ketat dan prosesnya cepat. Namun perlu dicatat, hal ini justru menempatkan UMKM pada posisi yang dapat memberikan tekanan bagi keberlangsungan UMKM tersebut.¹⁴

¹³Fadhil Muhammad Naufal and Achmad Firdaus, 'Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA)', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2018), p. 196, doi:10.21043/equilibrium.v5i2.2612.

¹⁴Iis Nur 'Aisyah And Others, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia', *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2, 2020, 114–26.

4. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan konvensi koperasi konvensional dengan menambahkan prinsip-prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan hukum Islam dan meniru perilaku ekonomi Nabi dan para sahabat.

Koperasi syariah mampu memberikan modal kepada pelaku ekonomi yang membutuhkan modal usaha. Pemberian modal diberikan dengan syarat sifat usahanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Koperasi syariah mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikelolanya.

b. Prinsip dan Peran Koperasi Syariah

1) Prinsip Koperasi syariah

Koperasi syariah mengikuti prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar dan spekulasi, serta mengedepankan kesadaran sosial dalam segala aktivitasnya. Koperasi syariah diatur dalam bidang perekonomian sesuai dengan Al-Quran.

2) Peran Koperasi Syariah

Dalam buku pintar ekonomi islam, terdapat 7 poin tentang peran koperasi syariah diantaranya yaitu¹⁵

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, serta konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi inslam dan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Koperasi syariah adalah sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota koperasi sehingga mampu bekerjasama

¹⁵Ahmad Ifran Shoilihin, *Buku Pintar Ekonomi Syaariah*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.483

melakukan control terhadap koperasi secara efektif.

6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

7) Menumbuh kembangkan Usaha-usaha produktif anggota koperasi syariah tersebut.

5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan termasuk diantaranya kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang bagi orang atau keluarga miskin yang berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro, dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.¹⁶

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan

¹⁶Syaikhu Usman And Others, *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin* :, 2004.

usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip syariah. Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan LKMS sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. LKMS tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial.¹⁷ Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang bekerja menurut konsep syariah dengan prinsip *profit lost sharing* sebagai metode utama.

b. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Keberadaan LKMS bertujuan untuk memwadhahi bagi mereka yang ingin memenuhi prinsip syariah dalam transaksi keuangan, sehingga pengusaha kecil

¹⁷S.Aam Rusydiana and Irman Firmansyah, 'Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), p. 50.

atau menengah yang belum dapat mengakses produk dan jasa Perbankan Syariah akibat persyaratan yang belum terpenuhi, dapat mengakses LKMS.¹⁸

Dalam Undang-Undang disampaikan bahwa tujuan LKMS adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, untuk membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan untuk membantu meningkatkan penghasilan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bagi LKM yang berbadan hukum koperasi harus tunduk pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang koperasi.¹⁹

6. *Sustainable Development Goals*

a. *Pengertian Sustainable Development Goals*

Sustainable Development Goals merupakan komitmen pembangunan global yang perlu diimplementasikan ke dalam pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan beberapa langkah untuk mengetahui apa saja yang mengintegrasikan target dan indikator SDG ke dalam pembangunan daerah.

¹⁸Aan Nasrullah, 'Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional', in *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI*, 2017, 1, 20.

¹⁹Ahmad Hudaifah, dkk, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah:CV. Inti Media Komunika, 2020) h.1

Sustainable Development Goals merupakan dokumen kesepakatan pembangunan global untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pada proses pembangunan.

Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial, ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Oleh karena itu, SDGs memiliki tiga pilar utama yaitu pembangunan manusia, sosial ekonomi dan lingkungan.²⁰

b. Dimensi *Sustainable Development Goals*

1) Dimensi pertama ekonomi dan sosial

Mencerminkan pembangunan sosio-ekonomi dengan mengorbankan sumber daya dan iklim. Terdiri dari tidak ada kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitas, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, perdamaian, keadilan, dan

²⁰Rosita Novi Andari, 'Resensi: Sdgs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan', *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24.1 (2021), 137 <<https://doi.org/10.31845/Jwk.V24i1.713>>.

institusi yang kuat. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.²¹

2) Dimensi kedua lingkungan

Didominasi oleh lingkungan terdiri dari kehidupan di bawah air dan kehidupan di darat.

3) Dimensi ketiga kesetaraan

Terdiri dari mengurangi kesenjangan.

c. Tujuan *Sustainable Development Goals*

1) Tanpa kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2) Tanpa kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4) Pendidikan berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif

²¹ Xutong Wu and others, 'Three Main Dimensions Reflected by National SDG Performance', *Innovation*, 4.6 (2023), p. 100507, doi:10.1016/j.xinn.2023.100507.

dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5) Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6) Air bersih dan sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7) Energi bersih dan terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9) Industri, inovasi dan infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10) Mengurangi kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara di antara negara-negara di dunia.

11) Keberlanjutan kota dan komunitas

Membangun kota-kota serta permukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12) Konsumsi dan produksi bertanggung jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13) Aksi terhadap iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14) Kehidupan bawah laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15) Kehidupan di darat

Melindungi dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16) Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian

Meningkatkan perdamaian termaksud masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk

lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.

17) Kemitraan untuk mencapai tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.²²

d. Elemen pembangunan Keberkelanjutan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²³

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, dan kesetaraan sosial.

Tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan:

- 1) Ekonomi, yaitu memaksimalkan pendapatan dengan mempertahankan atau meningkatkan cadangan kapital.
- 2) Ekologi, yaitu menjaga dan mempetahankan sistim fisik dan biologis

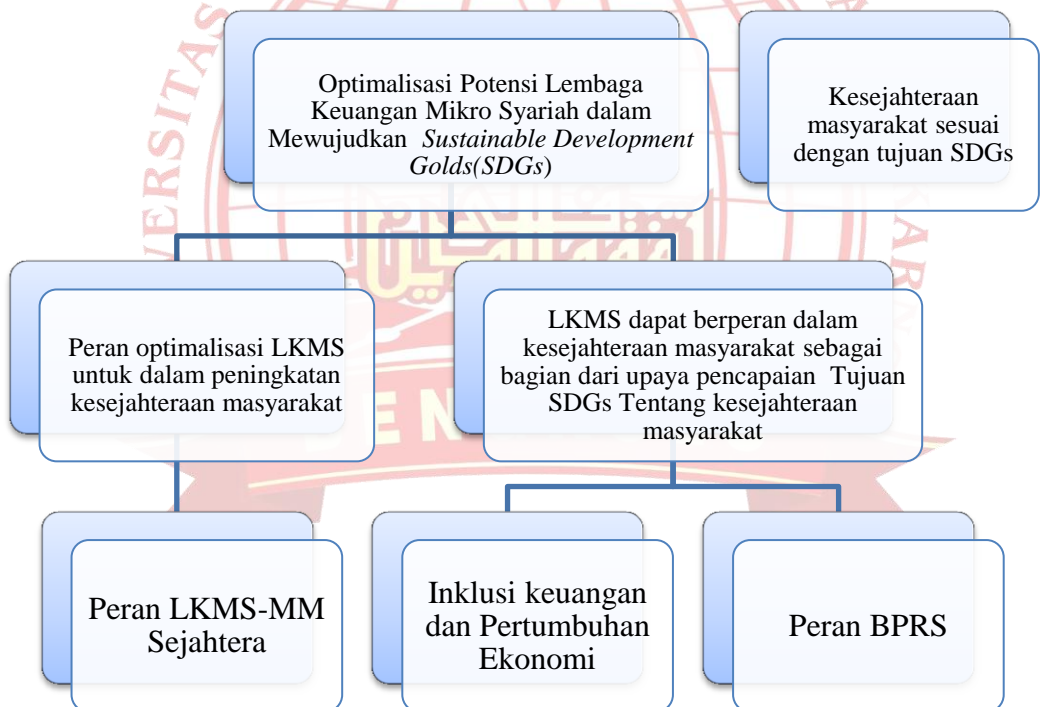
²²Barry D. Solomon, 'Sustainable Development Goals (SDGs)', *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium*, 0042 (2023), pp. 526–27, doi:10.4337/9781788974912.S.104.

²³Tari Diana Putri and Romi Adetio Setiawan, *Pandangan Ekonomi Islam Dalam Menentukan Harga Komoditi Pertanian*, 2023.

- 3) Sosial budaya, yaitu menjaga stabilitas dari sistem sosial dan budaya.²⁴

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka berfikir tentang hubungan variabel-variabel yang terlibat dalam sebuah penelitian atau hubungan antar beberapa konsep lainnya dari masalah yang sedang diteliti berdasarkan dengan hal yang telah diuraikan pada kajian teori.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

²⁴Nurlita Pertiwi, 'Implementasi Sustainable Development Di Indonesia', 2016, pp. 1–23.